



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019



PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

Jl. Letnan Jendral Suprpto

Banjarnegara - Jawa Tengah 53418

☎ (0286) 592810, 📠 (0286) 591593

🌐 www.pa-banjarnegara.go.id, ✉ pabanjarnegara@gmail.com

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

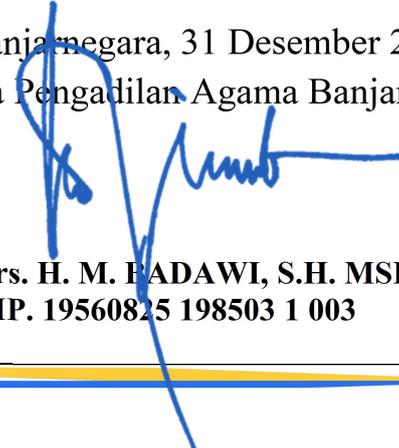
Pada pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 atas perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. disebutkan bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Dalam rangka pembinaan tersebut salah satunya dengan cara menyampaikan informasi tertulis mengenai kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA baik yang telah dilakukan maupun yang direncanakan.pada waktu mendatang. Informasi tertulis secara berkala tersebut yang disebut sebagai Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019.

Laporan ini memuat kegiatan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 baik yang bersifat yustisial maupun non yustisial dengan segala problematikanya, laporan ini juga sekaligus memuat rencana strategis yang ingin dicapai oleh Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA.

Meskipun laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, kami berharap sangat bermanfaat dan laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan pembinaan untuk mencapai kebaikan khususnya bagi Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA dimasa yang akan datang. Amin

Banjarnegara, 31 Desember 2019
Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara


Drs. H. M. PDAWI, S.H. MSI.
NIP. 19560825 198503 1 003

DAFTAR ISI

Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN TEKNIS YUDISIAL	
A. Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Banjarnegara	4
B. Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Banjarnegara.....	6
- Jumlah sisa perkara yang diputus	6
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu.....	6
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	7
- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi	8
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversifikasi	8
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)	8
- Posbakum	8
- Sidang Keliling	9
- Perkara Prodeo (Pembebasan biaya perkara)	9
Bab III Sumber Daya Manusia	10
- Mutasi	10
- Promosi	11
- Pensiun.....	11
- Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat).....	11
Bab IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi.....	12
A. Pengelolaan Keuangan.....	14
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	15
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	15
- Implementasi E-Court di Lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara	15
- Implementasi SIPP di Lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara	16
Bab V Peningkatan Pelayanan Publik	17
- Akreditasi Penjaminan Mutu	17
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19
- Inovasi Pelayanan Publik	19
Bab VI Pengawasan.....	20
A. Internal	20
B. Evaluasi	22
Bab VII Kesimpulan dan Rekomendasi	25
A. Kesimpulan	25
B. Rekomendasi	27

B A B I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan tertinggi, mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 Lingkungan Peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, secara implisit Mahkamah Agung RI telah memiliki Blue Print (cetak Biru) 2010-2035. Rencana Strategis Mahkamah Agung RI dan Road Map Penerapan Cetak Biru. Dalam hal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Banjarnegara di bawah naungan MARI telah berupaya memperbaiki serta melengkapi seluruh komponen dalam hal tercapainya tujuan Reformasi Birokrasi. Pengadilan Agama Banjarnegara berupaya merealisasikannya antara lain melalui kegiatan Transparansi Putusan terhadap para pencari keadilan yang telah dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak berperkara untuk mengakses putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap pada website Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA juga memperkecil kesempatan pihak berperkara untuk bertemu dengan Hakim maupun Panitera, website tersebut dapat diakses setiap saat, adanya website tersebut juga merupakan transparansi informasi kegiatan teknis maupun administrasi pada Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA sehingga telah ditayangkan pula informasi berkenaan dengan realisasi dana APBN tahun berjalan Tahun 2019.

B. VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA adalah merupakan manifestasi dari Visi Mahkamah Agung RI serta merupakan perpanjangan dari Visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama RI dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang akan menjadi pandangan dan penunjuk arah serta sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi guna mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035.

Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA sebagai salah satu badan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan :

VISI :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Banjarnegara yang Agung.”

MISI :

1. *Menjaga kemandirian badan peradilan;*
2. *Menyelenggarakan Peradilan yang bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;*
3. *Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;*
4. *Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan;*

Untuk mengkonkritkan visi dan misi tersebut bukan pekerjaan mudah, diperlukan suatu penelaahan mendalam atas segala permasalahan yang ada serta penetapan rencana dan strategi yang tepat dan komprehensif diberbagai lini disektor kebijakan, adapun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi. Untuk mencapai Visi tersebut, ditetapkanlah Misi Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA, yaitu :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Penjelasan ketiga misi ini, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Pengadilan Agama Banjarnegara Yang Agung” adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan

Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan akan dilakukan dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel melalui penyempurnaan sistem kamar, penataan ulang manajemen perkara, upaya pembatasan perkara dan transparansi kinerja melalui manajemen perkara berbasis Informasi Teknologi.

2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan adalah suatu keniscayaan/keharusan bagi seluruh *stakeholder* pada Pengadilan Agama Banjarnegara untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

3. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan

Keadaan dan letak geografis Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, tingkat pendidikan yang rendah serta tingkat pendapatan masyarakat yang sangat kecil, merupakan kendala utama dan permasalahan yang tak terbantahkan, sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan pelayanan akses masyarakat guna mendapatkan hak keadilan baginya. Pengadilan Agama Banjarnegara sebagai pelaksana kawal depan Mahkamah Agung RI di daerah, melalui mekanisme bantuan hukum berupaya memfasilitasi masyarakat miskin tersebut dengan meningkatkan akses peradilan melalui pembebasan biaya perkara dan sidang keliling.

C. RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)

Rencana strategis Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA Tahun 2015–2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara diselaraskan dengan arah kebijakan dan Program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJPM) tahun 2015-2019 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

B A B II

PELAKSANAAN KEGIATAN TEKNIS YUDISIAL

A. KEADAAN PERKARA

Bahwa pada tahun 2019 Pengadilan Agama Banjarnegara mengalami kenaikan kuantitas jumlah perkara yang ditangani dibandingkan dari Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Sisa Perkara di Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2018

No	JENIS PERKARA	Sisa Perkara
1	Izin Poligami	0
2	Pembatalan Perkawinan	0
3	Cerai Talak	112
4	Cerai Gugat	334
5	Harta Bersama	1
6	Penguasaan Anak	0
7	Pengesahan Anak	0
8	Perwalian	1
9	Istbat Nikah	0
10	Dispensasi Kawin	5
11	Wali Adhol	1
12	Ekonomi Syariah	0
13	Kewarisan	2
14	P3HP/Penetapan Ahli Waris	0
15	Lain-lain *)	0
TOTAL		456

Selama tahun 2019 Pengadilan Agama Banjarnegara telah menerima sebanyak 3059 perkara dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Perkara diterima Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2019

No	JENIS PERKARA	Bulan												Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Izin Poligami	1				1			1		1			4
2	Pembatalan Perk													0
3	Cerai Talak	72	54	58	39	35	44	62	58	72	70	75	37	676
4	Cerai Gugat	215	129	140	146	89	183	203	155	161	197	153	128	1899
5	Harta Bersama									1	1			2
6	Penguasaan Anak													
7	Pengesahan Anak							1						1
8	Perwalian			1				1	2	1	1			6
9	Istbat Nikah	1		1				1	1	2	4	1		11
10	Dispensasi Kawin	22	19	12	14	15	17	26	17	14	28	180	69	433
11	Wali Adhol			1		1			1			1		4
12	Ekonomi Syariah					1	1					2		4
13	Kewarisan			1							2			3
14	P3HP/Penet AW	1				2		1	1	1				6
15	Lain-lain *)		2	1	1			2	2		1	1		10
TOTAL														3059

Jumlah Perkara diterima Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2019 melalui E-Court

No	JENIS PERKARA	Bulan												Total	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Izin Poligami														
2	Pembatalan Perkawinan														
3	Cerai Talak							1	1		1	11	12	8	36
4	Cerai Gugat								3		1	15	20	21	60
5	Harta Bersama														
6	Penguasaan Anak														
7	Pengesahan Anak														
8	Perwalian														
9	Istbat Nikah														
10	Dispensasi Kawin											4		4	

Jumlah perkara yang diputus tahun 2019 dapat dirinci sebagai berikut:

Rincian perkara diputus pada Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2019

No	JENIS PERKARA	JUMLAH	SATUAN
1	Izin Poligami	4	Perkara
2	Pembatalan Perkawinan		Perkara
3	Cerai Talak	607	Perkara
4	Cerai Gugat	1726	Perkara
5	Harta Bersama	2	Perkara
6	Penguasaan Anak		Perkara
7	Pengesahan Anak	1	Perkara
8	Perwalian	4	Perkara
9	Istbat Nikah	5	Perkara
10	Dispensasi Kawin	362	Perkara
11	Wali Adhol	4	Perkara
12	Ekonomi Syariah	3	Perkara
13	Kewarisan		Perkara
14	P3HP/Penetapan Ahli W	5	Perkara
15	Lain-lain *)	4	Perkara
TOTAL		3140	

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK
Jumlah perkara tahun 2019 yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 3135 perkara, tidak mengajukan upaya hukum Kasasi 3135 perkara, dan tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali 3135 perkara atau sebesar 0,99 % dari semua perkara yang ditangani tahun 2019.

Rekapitulasi perkara Banding pada Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2019

Perkara Banding	Perkara diputus	Sisa	Ket
5	3	2	

Rekapitulasi perkara Kasasi pada Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2019

Perkara Kasasi	Perkara diputus	Sisa	Ket
2	2	0	

Rekapitulasi perkara PK pada Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2019

Perkara PK	Perkara diputus	Sisa	Ket
-	-	-	

- Jumlah perkara yang berhasil dimediasi
Jumlah perkara tahun 2019 yang berhasil dimediasi sebanyak ... perkara atau sebesar ... % dari semua perkara yang ditangani tahun 2019.

Perkara ditangani 2019	Mediasi Perkara	Berhasil	Tidak Berhasil	% berhasil mediasi 2019
3596	325	6	319	0.00%

- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi
Sebagai penyelenggara peradilan, Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA tidak menangani perkara anak melalui diversi.

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKAT ISO PENGADILAN)

- Pos Bantuan Hukum (Posbakum)
Posbakum sebagai bentuk bantuan hukum bagi para pihak yang akan berperkara di Pengadilan Agama Banjarnegara, pada tahun 2019 telah ditunjuk Lembaga Bantuan Hukum Banjarnegara dalam melaksanakan bantuan hukum bagi para pihak dalam bentuk konsultasi dan pembuatan gugatan/permohonan. Tahun 2019 ini, Pengadilan Agama Banjarnegara mendapatkan alokasi anggaran penyelenggaraan Posbakum sebesar Rp.30.000000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 29.900.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) atau sebesar 99,83 % dari anggaran Posbakum dengan target sasaran 600 jam layanan yang

direncanakan 120 orang dan teralisasi 600 jam layanan dan melayani 641 orang, sehingga melebihi target yang dilayani/perencanaan 400%

- Sidang Keliling.

Pengadilan Agama Banjarnegara pada tahun 2019 mengadakan sidang keliling sebanyak 20 kali bertempat di Unit Pelaksana Kegiatan Kecamatan Wahayasa untuk menjangkau para pihak yang jarak tempat tinggalnya cukup jauh dari Kantor Pengadilan Agama Banjarnegara, seperti Kecamatan Wanayasa, Kalibening, Pejawaran, Batur, Pagentan dan Karang kobar.

- Perkara Prodeo

Pada tahun 2019 melayani sebanyak 53 permohonan berperkara secara prodeo dengan perkara dibiayai oleh Anggaran DIPA 04 Tahun 2019 Pengadilan Agama Banjarnegara dan sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah untuk 50 perkara dan 3 perkara tanpa biaya atau sering disebut prodeo murni.

B A B III

SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka peningkatan dan efektivitas kinerja aparatur Peradilan Agama sudah barang tentu tidak akan terlepas dari unsur pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia yang harus dilakukan secara berkala dan terstruktur terhadap para aparatur pelaksana peradilan.

Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA mempunyai anggaran untuk pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik peningkatan kualitas di bidang kepaniteraan yang bertujuan guna meningkatkan kualitas aparatur peradilan di bidang teknis maupun peningkatan kualitas di bidang kesekretariatan. Namun di samping itu harus diperhatikan agar tidak terjadi kejenuhan dan motivasi dalam pelaksanaan kinerja, harus diperhatikan pula adanya pemberian penghargaan kepada aparatur peradilan yang dipandang cakap dan mampu berupa mutasi, baik usulan promosi maupun penyegaran dalam pelaksanaan tugas dalam bentuk rotasi disamping itu pimpinan memberikan penghargaan berupa penghargaan berupa surat keputusan penghargaan.

Pengadilan Agama Banjarnegara secara konsisten memberikan kesempatan yang sama untuk para aparatur maupun pejabat untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan yang mendukung peningkatan kinerja pegawai baik itu yang bersifat teknis maupun non teknis yudisial.

- Mutasi
 - a. Mutasi Kenaikan Pangkat untuk periode April 2019 diusulkan 1 pegawai dan periode Oktober 2019 diusulkan 1 pegawai.
 - b. Penerbitan surat pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala selama tahun 2019 sebanyak 16 pegawai.
 - c. Mutasi keluar dari Pengadilan Agama Banjarnegara ke Pengadilan Agama lainnya tahun 2019 tidak ada.
 - d. Mutasi masuk dari Pengadilan Agama Lain ke Pengadilan Agama Banjarnegara sebanyak 2 pegawai.

No	Nama	Asal Satuan Kerja	Jabatan
1	Sri Hidayati	PA Wonosobo	Staf Pelaksana
2	Muhammad Irfan, S.H.I.	PA Kota Banjar	Staf Pelaksana

e. Calon Pegawai Negeri Sipil

Pengadilan Agama Banjarnegara pada tahun 2019 menerima 2 orang Calon Pegawai Negeri Sipil yaitu:

No	Nama	Jabatan
1	Mahardikho Hesti Wicaksono, S.Kom	Pranata Komputer
2	Lia Ratnasari, S.E.	Analisis Kepegawaian

- Promosi

Promosi yang diajukan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara pada tahun 2019 adalah usulan pengangkatan sebagai Jurusita Pengganti atas nama Sri Hidayati namun belum terrealisasi.

- Pensiun

Tahun 2019 terdapat 3 pegawai mencapai masa pensiun yaitu:

No	Nama	Jabatan	Pertanggal	Keterangan
1	Triasih	JSP	01 Mei 2019	MD
2	Minhad	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	31 Mei 2019	
3	Siti Musriatun M	Panitera Pengganti	31 Desember 2019	

Adapun pegawai yang diusulkan pensiun sebanyak 4 orang

No	Nama	Jabatan	Pertanggal	Ket
1	Adi Permono, S.H.	Sekretaris	31 Januari 2020	
2	Slamet Taufik Hidayat, BA.	Kasubag PTIP	31 Maret 2020	
3	Dra. Hj. Ely Nurhayati	Hakim	31 Mei 2020	
4	Imam Suaedi	JSP	30 September 2020	

- Pendidikan dan Pelatihan

Aparatur Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengikut pendidikan dan pelatihan

pada tahun 2019 sebanyak 2 pegawai CPNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar ASN di Yogyakarta

- Penghargaan

Selama tahun 2019 Pengadilan Agama Banjarnegara tidak ada pegawai memenuhi syarat untuk mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya maupun penghargaan individual lainnya.

Adanya mutasi keluar dan mutasi masuk serta beberapa pegawai yang mencapai batas usia pensiun per 31 Desember 2019 jumlah aparatur yang bertugas di Pengadilan Agama Banjarnegara sebanyak 28 pegawai negeri sipil dan 8 orang tenaga honorer.

DAFTAR STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS I A

PER 31 DESEMBER 2019

Ketua	: Drs. H. M. BADAWI, S.H., MSI..
Pejabat Fungsional Hakim	: 1. Drs. Hj. ELY NURHAYATI 2. Drs. RUSWANTO. S, MSI. 3. Drs. H. ABDUL MUJIB, SH. MH. 4..Drs. H. NURSALIM, MH. 5. Drs. H. NUR AMIN, MH. 6.Drs. H. NURRUDIN, SH. MH. 7. Drs. MURIDI, MH. 8. Drs. BAKIR FUADI 9. Drs. ROHMAT, MH. 10. Drs. SUHAEB
Panitera	: MOHAMAD DARDIRI, S.H., M.H.
Sekretaris	: ADI PERMONO, SH.
Panitera Muda Hukum	: Drs. FAUZAN
Panitera Muda Permohonan	: Hj. SRI WAHDANI, S.H.
Panitera Muda Gugatan	: ANAS MUBAROK, SH.

Kasubag Kepegawaian& Ortala : -

Kasubag Keuangan & Umum : SITI KHOTIJAH, S.H.

Kasubag PTIP : SLAMET TAUFIK HIDAYAT, BA.

Panitera Pengganti : 1. AYANI, S.Ag.
2. HIDAYATI, Bc.Hk.
3. ANIQOTUR RIFA'AH, SH.

Jurusita pengganti : 1. IMAM SUAEDI
2. SUNARTO
3. ANGKAT

Staf Pelaksana : 1. MUHAMMAD IRFAN, S.H.I.
2. SRI HIDAYATI
3. MAHARDIKHO HW, S.Kom
4. LIA RATNASARI, S.E.

B A B IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan Keuangan Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2019 ada 2 buah DIPA yakni DIPA 01 yakni Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan DIPA 04 yakni Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

DIPA 01 Tahun 2019 :

1. Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;

Pada anggaran DIPA 01 terealisasi sebesar Rp. 7.000.107.508,- (Tujuh milyar seratus tujuh juta lima ratus delapan rupiah) atau 99,49 % dari total anggaran sebesar Rp. 7.036.604.000,- (tujuh milyar tiga puluh enam juta enam ratus empat ribu rupiah), terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

Pada tahun 2019 belanja pegawai terealisasi sebesar Rp. 6.105966.100,- (enam milyar seratus lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu eratus rupiah atau 99,74% dari total anggaran sebesar R. 6.121.656.000,- (enam milyar seratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

b. Belanja Operasional

Pada tahun 2019 belanja operasional terealisasi sebesar Rp.798.238.200,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah) atau 97,984% dari total anggaran sebesar R. 814.668.000,- (delapan ratus empat belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

c. Belanja Non Operasional

Pada tahun 2019 belanja non operasional terealisasi sebesar Rp.21.265.000,-,- (dua puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau 84,12% dari total anggaran sebesar R. 25.280.000,- (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), hal ini dikarenakan adanya anggaran untuk perjalanan dinas ke KPKNL tidak terserap karena rekon, pelaporan dll dilaporkan melalui Email ;

DIPA 04 tahun 2019 :

Pada tahun 2019 untuk DIPA 04 Pengadilan Agama Banjarnegara mendapat alokasi dana sebesar Rp. 71.300.000,- (tujuh puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) diperuntukan :

1. Pembebasan Biaya Perkara/Prodeo

Pada program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk melayani 50 perkara dan terserap 100% atau Rp. 12.500.000,-

2. Penyelesaian Perkara di luar gedung/sidang keliling

Pada program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk melayani 100 perkara dengan 20 kegiatan dan terserap 100% atau Rp. 28,800.000,-

3. Layanan Bantuan Hukum/POS BAKUM

Pada program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk melayani 120 orang dengan 600 jam layanan dan terserap 99.83% atau Rp. 29.900.000,-

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Pengadilan Agama Banjarnegara, pada tahun 2019 mendapat alokasi dana sebesar Rp. 75.000,000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yakni sarana untuk pengadaan 6 (enam) Unit Lap Top untuk Hakim dan terserap 100 % yakni sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dan mendapat transfer masuk sebanyak 4 (empat) unit laptop dan 1 unit Kiosk.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Peradilan dan untuk memenuhi manajemen modern, Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara menerbitkan Keputusan nomor W11-A5/92/HK.05/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Tim Pengelola Teknologi Informasi Pengadilan Agama Banjarnegara;

Pengelolaan teknologi informasi di Pengadilan Agama Banjarnegara selama tahun 2019 dikelola dengan baik dengan dukungan jaringan sarana peralatan teknologi yang mencukupi namun dengan catatan jaringan internet berlangganan dari PT Jala Lintas Media setelah mendapatkan tambahan anggaran DIPA 2019 dari BUA kurang berjalan dengan baik sehingga menghambat beberapa pekerjaan yang tergantung dengan jaringan internet.

- Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Banjarnegara

e-Court adalah salah satu program unggulan Mahkamah Agung RI yang merupakan layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.

Dalam rangka mendukung program Mahkamah Agung RI, maka Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara menerbitkan Surat Keputusan nomor W11-A5/3346/HM.02.3/XI/2019 tanggal 07 Nopember 2019 tentang Fasilitas Pojok e-Court dan Surat Keputusan nomor W11-A5/3345/HM.02.3/XI/2019 tanggal 07 Nopember 2019 tentang Tim Layanan e-Court. Selain itu disediakan pula pamflet dan banner sosialisasi e-Court kepada masyarakat serta didukung fasilitas koneksi internet sebesar 50 Mbps Dedicated.

Sepanjang tahun 2019 Pengadilan Agama Banjarnegara telah menerima 100 (seratus) perkara melalui layanan e-Court. Dari perkara yang diterima 49 (empat puluh sembilan) perkara telah diputus.

- Implementasi SIPP di Pengadilan Agama Banjarnegara

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Banjarnegara secara konsisten menerapkan Sistem Informasi Penyelesaian Perkara dari proses pendaftaran sampai dengan adanya produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan.

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Bahwa ISO 9001:2015 merupakan standart Internasional di bidang sistem manajemen mutu secara formal untuk memberikan pelayanan yang prima/baik bagi pencari keadilan sesuai dengan stndar operasional pelayanan, maka dalam hal ini Pengadilan Agama Banjarnegara telah mnerapkan system Manajemen Mutu ISO 9001:2015 untuk melakukan peningkatan terusmenerus dan pada tanggal 13 Juni 2016 Pengadilan Agama Banjarnegara telah mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2015.



APM merupakan salah satu upaya yang dilakukan Ditjen Badilag untuk mewujudkan visi-misi yaitu menstandarisasikan sekaligus meningkatkan kinerja dan pelayanan pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan agama melalui program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM).

Maka pada tanggal 22 Juni 2018, Ditjen Badilag memberikan Sertifikasi akreditasi Penjaminan Mutu dengan terakreditasi A. (Excellent) bagi Pengadilan Agama Banjarnegara yang telah menerapkan sistem penjaminan mutu pada bidang administrasi manajemen, administrasi kesekretariatan, administrasi kepaniteraan dan administrasi sarana prasarana.



Pada tahun 2019 telah dilaksanakan *surveillance* terhadap akreditasi tersebut dan telah menetapkan bahwa Pengadilan Agama Banjarnegara mempertahankan penilaian akreditasi sebelumnya A Excellent.

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pengadilan Agama Banjarnegara telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam pelayanan publik. Dalam implementasinya PTSP Pengadilan Agama Banjarnegara melayani para pihak dari pendaftaran, pembayaran biaya perkara, meja informasi, pelayanan produk pengadilan, dan meja informasi dan pengaduan. Selain itu, Pengadilan Agama Banjarnegara telah menjalin kerjasama dengan PT Pos Indonesia dan Bank Syariah Mandiri yang secara rutin berada dalam gedung Pengadilan membantu pelayanan sehingga mempermudah para pencari keadilan dalam mengakses seluruh layanan.

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

- **Gugatan Mandiri**
Memberi kemudahan akses bagi para pencari keadilan adalah tujuan utama adanya inovasi pelayanan publik. Pengadilan Agama Banjarnegara membuat aplikasi yang dapat diakses oleh para pencari keadilan untuk membuat gugatan/permohonan secara mandiri sehingga para pihak dapat menuangkan gugatan dalam aplikasi dan dicetak saat itu secara gratis.
- **Antrian Layanan dan Sidang**
Menghindari adanya ketidakberaturan dalam pelayanan bagi para pencari keadilan, maka dengan instruksi dari Dirjen Badilag dibuatlah antrian layanan dan antrian sidang sehingga para pencari keadilan dapat menunggu berurutan untuk mendapatkan layanan yang diharapkan.
- **Aplikasi Notifikasi Perkara**
Untuk menghindari ketidakhadiran pihak saat sidang, khususnya untuk pemohon atau penggugat maka Pengadilan Agama Banjarnegara mengaplikasikan notifikasi hari sidang melalui bantuan teknologi informasi.

B A B VI

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan, karena inti dari pengawasan adalah pengendalian, dan pengendalian itu sendiri mengandung dua aspek yang tidak dapat dipisahkan yaitu pengawasan dan pembinaan. Dengan demikian Pengawasan di lingkungan Peradilan mempunyai landasan yang sangat kuat, karena merupakan salah satu unsur manajemen yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh agar organisasi berjalan dan berkesinambungan. Di dalam lingkungan Peradilan pengawasan internal mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

1. Pengawasan Melekat

Di dalam pengawasan melekat ini bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan terhadap bawahan secara preventif dan represif agar tugas-tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Di Pengadilan Agama Banjarnegara pengawasan melekat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara dengan cara terus-menerus memantau/mengawasi pelaksanaan tugas sehari-hari serta mengadakan rapat-rapat pembinaan secara periodik, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan adalah tugas Ketua Pengadilan. Oleh karena itu untuk mencapai pengawasan yang maksimal Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara dalam tahun 2019 menunjuk Hakim Pengawas Bidang yang bertugas membantu pimpinan untuk melakukan pengawasan di Pengadilan Agama Banjarnegara yang dilakukan secara berkala per triwulan dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara melalui Wakil Ketua sebagai koordinator Hakim Pengawas Bidang yang selanjutnya per semester dilaporkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Semarang.

Dasar pengawasan untuk triwulan ketiga yaitu Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor W11-A5/1673/PS.01/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Banjarnegara, dengan uraian sebagai berikut :

NO	NAMA, NIP, GOLONGAN/RUANG	JABATAN DALAM PENGAWASAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I. NIP.196105031992031002 Hakim Madya Utama (IV/c)	1. Koordinator Pengawas; 2. Pengawas Bidang Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana
2	Drs. H. Nur Amin, M.H. NIP.196407201993031002 Hakim Utama Muda (IV/d)	Pengawas Bidang Register Perkara dan SIPP
3	Drs. H. Rohmat, M.H. NIP. 19671008.199303.1.005 Hakim Madya Utama (IV/c)	Pengawas Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi & Website
4	Drs. H. Abdul Mujib, S.H., M.H. NIP.195710291984031002 Hakim Utama Muda (IV/d)	Pengawas Bidang Inventaris Barang Milik Negara (BMN)
5	Drs. H. Moh. Nursalim, M.H. NIP.196103131993031001 Hakim Utama Muda (IV/d)	Pengawas Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
6	Drs. Bakir Fuadi NIP.196507071993031007 Hakim Madya Utama (IV/c)	Pengawas Bidang Keuangan DIPA
7	Drs. Muridi, M.H. NIP.196204191993031003 Hakim Utama Muda (IV/d)	Pengawas Bidang Keuangan Perkara
8	Dra. Hj. Ely Nurhayati NIP.195505051986032001 Hakim Utama Muda (IV/d)	Pengawas Bidang Penataan Lingkungan Kebersihan dan Perpustakaan
9	Drs. Suhaeb NIP.196803251994031008 Hakim Madya Utama (IV/c)	Pengawas Bidang Laporan Perkara dan Arsip Perkara
10	Drs. Ruswanto S., M.S.I. NIP.195611241987031001 Hakim Utama Muda (IV/d)	Pengawas Bidang Administrasi Persidangan

2. Pengawasan Fungsional

Istilah pengawasan fungsional digunakan secara resmi untuk pertama kalinya dalam Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1983. Adapun definisi secara lengkap sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 pada pedoman umum angka 1

huruf c adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pengawasan fungsional Pengadilan Agama Banjarnegara dalam melaksanakan tugas-tugasnya diawasi langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang baik dalam bentuk pengawasan maupun monitoring dan Badan Pengawasan dari Mahkamah Agung RI

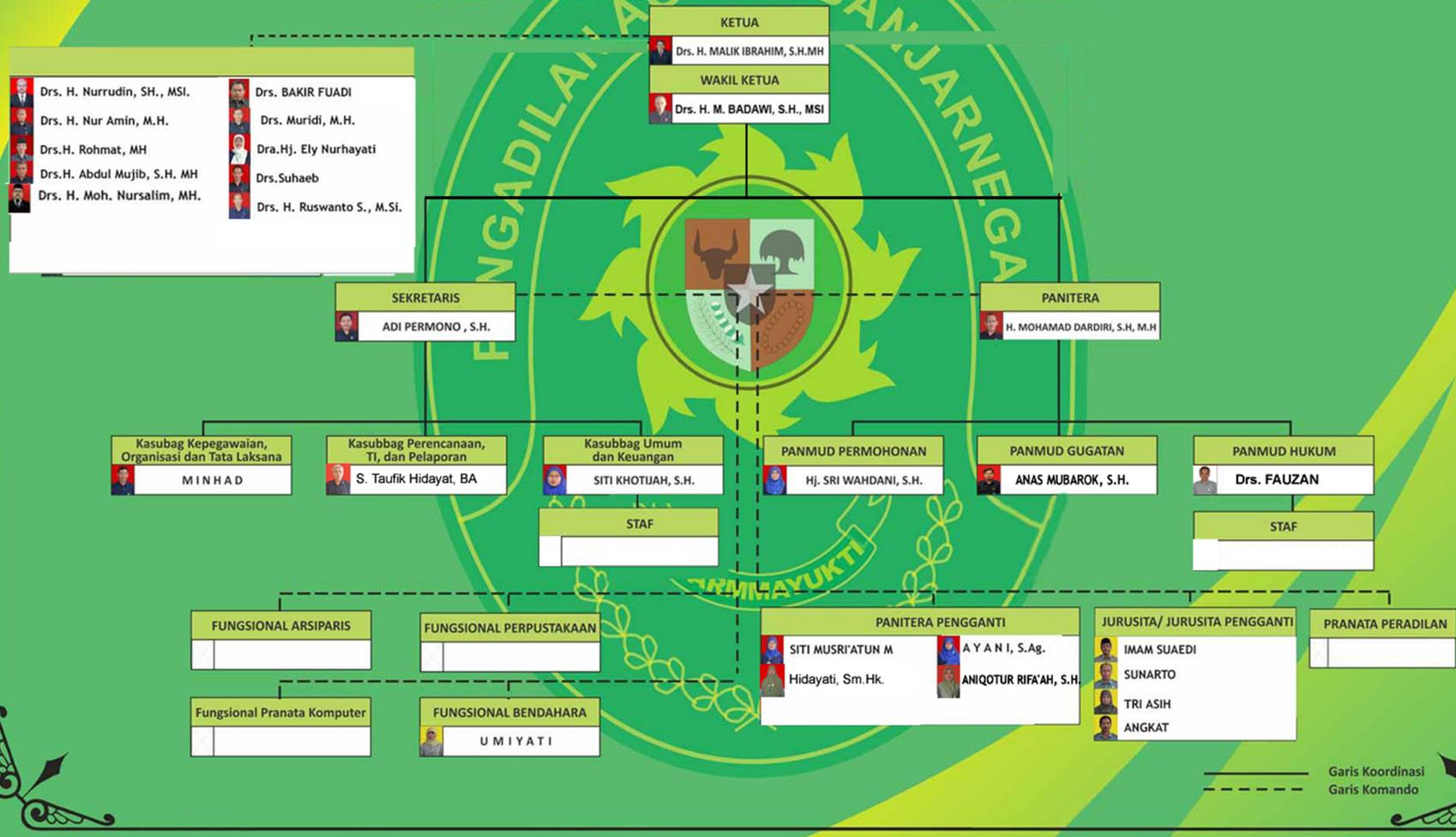
B. EVALUASI

Sebagai realisasi dari fungsi pengawasan, Pengadilan Agama Banjarnegara telah mengadakan upaya evaluasi sebagaimana tindak lanjut dari surat Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengadakan sosialisasi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi,
2. Mengadakan sosialisasi PERMA RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
3. Mengadakan sosialisasi PERMA RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
4. Hakim Pengawas bidang yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara telah melakukan pemeriksaan secara komprehensif tentang tugas pokok di lingkungan kepaniteraan dan kesekretariatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang setiap 6 (enam) bulan sekali (per semester)
 - b. Setelah melakukan pemeriksaan masing-masing Hakim Pengawas Bidang membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam bentuk berita acara

- pemeriksaan dan dilampiri hasil temuan hakim-pengawas serta rekomendasi tindak lanjut untuk mengatasi hambatan yang ditemukan.
- c. Berita acara pemeriksaan dan hasil temuan serta rekomendasi tersebut, diserahkan kepada Wakil Ketua selaku koordinator dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara untuk di evaluasi.
 - d. Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara setelah melakukan evaluasi atas hasil temuan Hakim Pengawas Bidang, memberikan tindak lanjut dengan memerintahkan kepada masing-masing atasan langsung pejabat atau petugas yang melaksanakan pekerjaan itu agar segera melakukan perbaikan-perbaikan dengan skala prioritas.
 - e. Temuan-temuan yang tidak dapat segera diatasi dijadikan bahan pembuatan rencana kerja tahun berikutnya.
5. Mengevaluasi pelaksanaan Aplikasi SIPP dan APS yang telah diterapkan di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA untuk selanjutnya melakukan penyempurnaan;

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS I A



B A B VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh Pengadilan Agama Banjarnegara dalam hal memberikan pelayanan publik terutama kualitas Sertifikasi Penjaminan Mutu yang telah diakui dan telah mengoptimalkan penggunaan sistem teknologi informasi SIPP, reformasi birokrasi, maupun pelayanan dalam bentuk manual merupakan keberhasilan bersama seluruh jajaran Pengadilan Agama Banjarnegara, meskipun tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Dalam rangka mewujudkan instansi yang bersih dan berwibawa dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan, maka Pengadilan Agama Banjarnegara, dari tahun ke tahun senantiasa melakukan pembenahan di segala bidang, baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan. Pembenahan tersebut dilakukan dengan cara penertiban administrasi Kepaniteraan dan administrasi Kesekretariatan yang sesuai dengan standar administrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan untuk efisiensi dan efektifitas pekerjaan, Pengadilan Agama Banjarnegara memaksimalkan penggunaan aplikasi. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari tujuan tersebut, maka dilakukan juga pengawasan terhadap jalannya administrasi di lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara, agar langkah-langkah perbaikan senantiasa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu menjadikan Pengadilan Agama Banjarnegara sebagai salah satu instansi yang bersih berwibawa, dan dapat memberikan pelayanan primaterhadap masyarakat pencari keadilan dengan cara lebih terbuka dan transparan melalui jaringan IT. Semakin mengecilnya tingkat pengaduan masyarakat, mengecilnya perkara-perkara banding dan kasasi atas produk putusan Pengadilan Agama Banjarnegara, menandai tingkat kepuasan/kepercayaan masyarakat pencari keadilan semakin tinggi. Hal tersebut berarti perubahan kinerja seluruh jajaran Pengadilan Agama Banjarnegara di tahun 2018 semakin baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.
2. Rencana strategis Pengadilan Agama Banjarnegara tahun 2019 merupakan pengembangan sistem penilaian kinerja yang lebih transparan, obyektif, adil dan

akuntabel dengan berbasis kompetensi dan kinerja dengan meningkatkan kualitas laporan yang tersistem sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 036/SEK/PER/VI/2012 tentang Sasaran Kinerja Individu (SKI) Pejabat Struktural Eselon III, Pejabat Struktural Eselon IV, Pejabat Struktural Eselon V, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Di Seluruh Indonesia, apalagi telah diwajibkan setiap pegawai membuat Perjanjian Kinerja, Laporan Lembar Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

3. Pelayanan kepada publik pencari keadilan sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 jo. KeputusanDirektur Jenderal BADILAG Nomor: 0017/Dj.A/SK/VII/2011 telah dijalankan dengan tetap melakukan terobosan-terobosan baru di bidang IT demi menunjang informasi pelayanan publik. Dan terhadap penanganan perkara di Pengadilan Agama Banjarnegara telah dilaksanakan dengan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) secara profesional dengan mengedepankan pelayanan prima.
4. Pengawasan di Pengadilan Agama Banjarnegara telah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 145/KMA/VII/SK/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan Peradilan dengan tetap mengedepankan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah sebagai tolok ukur keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah kepada masyarakat dengan melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja yang didasarkan atas profesionalisme, etika dan moral.
5. Sumber daya manusia di Pengadilan Agama Banjarnegara baik di bidang teknis yudisial maupun non teknis yudisial telah dibina, dikelola dan diberdayakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip “*the right man on the right job*”, sekalipun jumlah sumber daya manusia tersebut kurang memenuhi standar ideal bagi Pengadilan Agama Klas I.A.

B. REKOMENDASI

a. Bidang Teknis Yustisial dan Administrasi Perkara

1. Perlu adanya penambahan jumlah Panitera Pengganti, dimana realitas yang ada tidak sebanding dengan jumlah Majelis Hakim dan Volume perkara yang ditangani.
2. Perlu penambahan jumlah jurusita Pengganti, dimana realitas yang ada tidak sebanding dengan jumlah perkara yang ditangani.
3. Perlu adanya pelatihan bidang kearsipan perkara dan arsip dinamis
4. Perlu diadakan peningkatan kadar pengetahuan serta kemampuan teknis yustisial melalui Diklat maupun Bimtek serta pembekalan seluruh pejabat Fungsioanal dan Struktural.
5. Perlu adanya penambahan perangkat komputer untuk peningkatan akses pelayanan publik.

b. Bidang Administrasi Umum dan Manajemen

1. Diperlukan adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dan strategi manajemen SDM dengan memperhatikan beban kerja, karena esensi tersebut seharusnya didasarkan atas prinsip-prinsip yang meliputi :
 - a. Dapat menarik sumber daya manusia yang berkualitas untuk bergabung dengan organisasi dan sekaligus mampu mempertahankan pekerja yang berkualitas yang sudah ada dalam organisasi;
 - b. Menyediakan reward terhadap pegawai yang berperilaku sesuai dengan yang diinginkan oleh organisasi (desired behaviour), seperti prestasi kerja, patuh, disiplin, berpengalaman dan bertanggungjawab;
 - c. Dalam rangka mendapatkan tenaga yang profesional perlu adanya rekrutmen pegawai baru dan pelaksanaan rotasi, mutasi maupun promosi pegawai berbasis kompetensi.
2. Untuk mewujudkan profesionalisme PNS perlu dilakukan berbagai jenis pendidikan dan pelatihan (Diklat/Bimtek) yang meliputi diklat gelar, non gelar, serta diklat teknis keterampilan. Berbagai diklat tersebut tentunya diarahkan sesuai dengan kebutuhan bangsa

C. PENUTUP

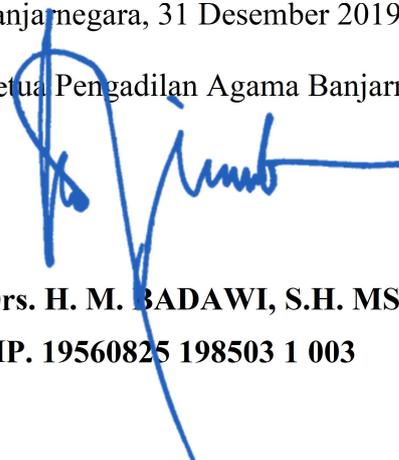
Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 ini kami buat sebagai visualisasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA selama tahun 2019. Laporan ini terwujud berkat kerja sama yang baik dari semua unsur yang terkait, mulai dari Pimpinan, para Hakim, Pejabat Struktural/ Fungsional Kepaniteraan dan Keskretariatian serta seluruh staf yang telah berupaya secara optimal untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat dengan berpedoman pada Program kegiatan yang telah dicanangkan.

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kegiatan yang kurang dapat dilaksanakan secara maksimal, untuk itu pada pelaksanaan kegiatan kedepan akan lebih dioptimalkan, semoga dengan tersusunnya laporan ini dapat dijadikan tolok ukur dalam memperbaiki kinerja secara profesional.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2019 ini. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan langkah kita dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan oleh bangsa dan negara. Amin

Banjarnegara, 31 Desember 2019

Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara


Drs. H. M. BADAWI, S.H. MSI.

NIP. 19560825 198503 1 003